

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**LAPORAN KEGIATAN ATAS PERBAIKAN PERHITUNGAN DAN
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN 21 UNTUK PEGAWAI
TIDAK TETAP PADA CV. BERMAKARYA PALEMBANG**



**Diajukan Oleh :
SITI APRILLITA PURBAYA
041180005**

**Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kerja
Lapangan dan Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

PALEMBANG

2021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**LAPORAN KEGIATAN ATAS PERBAIKAN PERHITUNGAN DAN
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN 21 UNTUK PEGAWAI
TIDAK TETAP PADA CV. BERMAKARYA PALEMBANG**



Diajukan Oleh :

SITI APRILLITA PURBAYA

041180005

**Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kerja
Lapangan dan Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

PALEMBANG

2021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING PKL

NAMA : SITI APRILLITA PURBAYA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 041180005
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL PKL : LAPORAN KEGIATAN
ATAS PERBAIKAN PERHITUNGAN
DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN 21 UNTUK PEGAWAI
TIDAK TETAP PADA CV.
BERMAKARYA PALEMBANG

Tanggal : 19 Januari 2021

Mengetahui,

Pembimbing

Direktur,

Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak.

Benedictus Effendi, S.T., M.T.

NIDN : 0204068901

NIP : 09.PCT.13

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI PKL

NAMA : SITI APRILLITA PURBAYA
NOMOR POKOK : 041180005
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
KONSENTRASI : AKUNTANSI
**JUDUL PKL : LAPORAN KEGIATAN ATAS PERBAIKAN
PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN 21 UNTUK
PEGAWAI TIDAK TETAP PADA CV.
BERMAKARYA PALEMBANG**

Tanggal : 4 Februari 2021

Penguji 1,

Tanggal : 4 Februari 2021

Penguji 2,

Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom.
NIDN: 0205108901

Mutiara Lusiana Anissa, S.E., M.Si.
NIDN: 0225128802

**Menyetujui,
Ketua,**

Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP :09.PCT.13

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jika tidak memaksakan diri sendiri, bagaimana bisa tahu batas kemampuan sendiri”.
(lita)

“Setiap detik dalam hidup kita adalah waktu yang tak akan pernah terulang, maka dari itu buatlah hidupmu lebih bermakna. Buat dirimu jadi orang yang berguna, dan jadikan dirimu sebagai penyemangat untuk dirimu sendiri. Semangat, kita semua hebat”.
(Siti A.P)

Ku Persembahkan kepada :

Allah SWT yang telah memberi kemudahan.

Kedua orang tuaku dan keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan ku.

Orang yang selalu di sampingku dan memberi memotivasi untuk mencapai semua ini.

Semua teman-teman yang saya sayangi.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah subhanahu Wa Ta'ala yang sudah memberikan berupa kesehatan dan kesempatan yang menjadikan penulis bisa merampungkan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

Laporan Prakttik Kerja Lapangan ini Berjudul **“Laporan Kegiatan Atas Perbaikan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Pada CV. Bermakarya Palembang”**. Praktik Kerja Lapangan ini sudah penulis laksanakan dengan sebaik-baiknya di CV. Bermakarya Palembang.

Tujuan Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk memantapkan teori dan praktik yang sudah dipelajari di kampus dan mampu diselesaikan dengan mengaplikasikanya di lapangan.

Adapun selama penulisan dan penyusunan laporan PKL ini, Penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak tersebut, yaitu kepada:

1. Allah SWT, karena-nya Penulis telah dimudahkan dalam menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
2. Direktur Politeknik Palcomtech, Bapak Benidictus Effendi, S.T.,M.T.
3. Kepala Program Studi Akuntansi yaitu Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E.,M.Si., Ak.
4. Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E.,M.Si.,Ak.selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan memberikan bimbingan selama penulis laporan.
5. Bapak Jefri Agit Saputra, selaku pembimbing Praktik Kerja Lapangan di CV. Bermakarya.
6. Staff dan karyawan CV. Bermakarya.
7. Ayah, Ibu, dan Keluarga yang telah memberikan dukungan materi dan moril.
8. Untuk teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan saranya selama penyusunan laporan PKL ini.

Demikian kata pengantar dari Penulis, dengan harapan laporan PKL ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, dengan kesadaran penulis bahwa laporan ini masih mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan sehingga membutuhkan banyak saran dan kritik yang membangun untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih.

Palembang, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	5
1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan.....	5
1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan.....	7
1.5 Waktu Praktik Kerja Lapangan	7
1.6 Teknik Pengumpulan Data	9
BAB II KEADAAN UMUM TEMPAT PKL.....	11
2.1 Profil Perusahaan dan Sejarah	11
2.2 Visi dan Misi Perusahaan	13
2.3 Program yang dikelola CV. Bermakarya Palembang.....	13
2.4 Struktur Organisasi	17
2.5 Uraian Tugas Wewenang.....	18
2.6 Lambang CV. Bermakarya Palembang	27
BAB III HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL	29
3.1 Pelaksanaan Kerja.....	29
3.1.1 Uraian Kegiatan PKL	30
3.1.2 Pengertian Pajak	30
3.1.3 Fungsi Pajak.....	31
3.1.4 Jenis Pajak	33
3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	35
3.1.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	36
3.1.7 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	38
3.1.8 Tarif dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21	49
3.2 Kendala yang dihadapi	50
3.3 Cara mengatasi kendala.....	51
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN.....	xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktik Lapangan Selama Sebulan.....	8
Tabel 3.1 Kegiatan Harian PKL di CV. Bermakarya Palembang.....	29
Tabel 3.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2016-2017	37
Tabel 3.3 Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dengan NPWP.....	40
Tabel 3.4 Tarif PPh 21 untuk Pegawai Tidak Tetap	43
Tabel 3.5 Gaji Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas	44
Tabel 3.6 Pelaporan Penghasilan 21 pada CV. Bermakarya Palembang.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi CV. Bermakarya Palembang.....	17
Gambar 2.2 Lambang Perusahaan CV. Bermakarya Palembang.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. *Form* Permohonan PKL (Fotokopi)
2. Lampiran 2. *Form* Pengajuan Judul PKL (Fotokopi)
3. Lampiran 3. *Form* Penilaian Kerja Mahasiswa PKL (Fotokopi)
4. Lampiran 4. *Form* Penilaian Pembimbing PKL (Fotokopi)
5. Lampiran 5. Daftar Hadir Mahasiswa PKL POLTEK (Fotokopi)
6. Lampiran 6. *Form* Konsultasi PKL (Fotokopi)
7. Lampiran 7. *Form* Pengajuan Ujian PKL (Fotokopi)
8. Lampiran 8. Surat Pernyataan PKL (Fotokopi)
9. Lampiran 9. Surat Balasan Dari Perusahaan (Fotokopi)
10. Lampiran 10. Bukti Rekap Gaji Pegawai Tidak Tetap (Asli)
11. Lampiran 11. *Form* Fevisi (Asli)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktik kerja lapangan adalah kegiatan mandiri mahasiswa yang dilakukan diluar kelas atau perkuliahan bisa dalam lingkungan atau luar kampus untuk mendapatkan pengalaman sesuai dengan jurusan mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berurutan dan serentak antara program pendidikan disekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut.

Praktik Kerja lapangan merupakan salah satu pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dengan kegiatan langsung di lembaga BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan instansi pemerintahan setempat. Praktik Kerja Lapangan juga dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini mahasiswa diberikan kebebasan oleh politeknik dalam menentukan sendiri perusahaan tempat praktik kerja lapangan berlangsung. Dalam waktu pelaksanaan dan lamanya praktik kerja lapangan merupakan ketentuan dari politeknik yaitu selama 1 bulan.

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan Penulis ditempatkan di bagian keuangan untuk perekapan data di CV. Bermakarya. Penulis juga dibimbing langsung oleh Bapak Jefri Agit Saputra dibantu dengan Bapak Syahrul, Pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan banyak tugas yang sudah Penulis kerjakan salah satunya adalah perekapan data gaji pegawai tidak tetap. Salah satu sumber dari penerimaan suatu Negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan di Indonesia yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah bersumber dari penerimaan pajak. Pentingnya pemahaman wajib pajak tentang kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun ketahun akan selalu sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula penerimaan Negara yang diperoleh dari sektor perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-4 atau Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) pada Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia

pengenaan pajak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pajak Negara dan Pajak Daerah. Salah satu sumber pajak Negara adalah pajak penghasilan.

Subjek pajak atau wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila memperoleh atau menerima penghasilan. Salah satu jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang ada Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurut peraturan Direktur Jendral Nomor PER-16/PJ/2016, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

CV. Bermakarya merupakan badan usaha yang melakukan jasa Desain dan Contractor. Kegiatan jasa CV. Bermakarya dilakukan oleh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pada perusahaan tersebut. Dalam hal ini Penulis tertarik untuk membahas pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Meski ketentuan perpajakannya berbeda dengan pegawai tetap, jenis pajak yang dikenakan sama yakni Pajak Penghasilan pasal 21.

Perusahaan CV. Bermakarya Palembang belum pernah melakukan perhitungan, pemotongan atau pun pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja harian lepas. Selain itu

pegawai tidak tetap juga tidak memiliki NPWP. Pebaikan Pajak pemotongan pajak pada CV. Bermakarya bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara perbaikan perhitungan dan pemotongan yang benar terkait dengan Pajak Penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang berpedoman pada ketentuan umum perpajakan dan undang-undang Pajak Penghasilan pasal 21 yang berlaku saat ini. Istilah yang digunakan bagi penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah imbalan atau upah harian, mingguan, atau upah borongan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP. Dalam aturan baru ini, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp 54.000.000 setahun atau Rp 4.500.000 per bulan. Sementara cara penghitungannya diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Jadi jika berpenghasilan hingga Rp4.500.000,00 sebulan, berdasarkan aturan PTKP 2020, pendapatan hingga Rp4.500.000,00 per bulan dibebaskan dari pungutan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, maka wajib pajak harus membayar Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan Praktik Kerja Lapangan dengan Judul **“Laporan Kegiatan Atas Perbaikan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Pada CV. Bermakarya Palembang”**

1.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai syarat dalam menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan.
2. Mahasiswa dapat membandingkan kesesuaian teori dikuliah dan praktik di lapangan.
3. Meningkatkan daya kreativitas dan produktivitas mahasiswa sebagai persiapan dalam memasuki dunia kerja.
4. Untuk mengetahui tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang ditetapkan dalam Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam dunia kerja serta meningkatkan ketrampilan mahasiswa.
 - b. Melatih agar mahasiswa dapat berfikir secara kritis, sistematis, dan kreatif dalam menghadapi sebuah permasalahan yang ada diperusahaan.
 - c. Melatih agar mahasiswa mudah dalam menyesuaikan diri dilingkungan kerja.

- d. Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Politeknik

- a. Menjalinkan hubungan kerja sama yang baik antara universitas dan perusahaan.
- b. Dapat meningkatkan kualitas lulusan dengan adanya program magang.
- c. Sebagai salah satu indikator dalam penilaian kemampuan dan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan didunia kerja.
- d. Dapat dijadikan informasi dengan referensi bacaan bagi penelitian lain khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang akan melakukan penelitian dengan topik permasalahan yang sama.

3. Bagi Perusahaan

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan.
- b. Meningkatkan citra perusahaan kepada mahasiswa.
- c. Membantu meringankan tugas karyawan diperusahan dalam bidang keuangan.
- d. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan diperusahaan dapat menjadikan ini sebagai bentuk percobaan kepada karyawan magang.

1.4. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan CV. BermaKaya yang bergerak dibidang Desain dan Contractor. Penulis ditempatkan pada bagian keuangan. Berikut merupakan informasi mengenai perusahaan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan:

Nama Perusahaan : CV. BermaKarya

Alamat : Jalan Brigjen Hasan Kasim Ruko 06.Warkop7
Celentang Palembang

Telepon : (0711)5707812

Email : bermakarya17@gmail.com

Website : bermakarya17.wixsite.com/Palembang

1.5. Waktu Praktik Kerja Lapangan

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan penulis mencari perusahaan yang dapat dijadikan untuk Praktik Kerja Lapangan dan sudah diakui keberadaanya, letak yang strategis dan mudah untuk di temui. Sebelum memulai Praktik Kerja Lapangan penulis terlebih dahulu mengurus surat permohonan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan kepada Direktur Utama CV. BermaKarya.

Setelah selesai mengurus surat permohonan yang dibuat oleh pihak (BAAK) Palcomtech. Kemudian dilanjutkan dengan

memberikan langsung surat permohonan Praktik Kerja Lapangan ke CV. Bermakarya Palembang untuk selanjutnya diberikan kepastian berupa konfirmasi surat balasan oleh pihak perusahaan. Ketika Penulis sudah terkonfirmasi untuk menjadi mahasiswa magang, penulis dapat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di CV. Bermakarya selama satu bulan dimulai dari tanggal 21 November 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020. Ketentuan Praktik Kerja Lapangan di CV. Bermakarya, yaitu:

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktik Lapangan Selama Sebulan

Hari	Jam Kerja	Keterangan
Senin s.d Jum'at	08.00-12.00 WIB	
	12.00-13.00 WIB	Istirahat
	13.00-16.00 WIB	

Sumber: data diolah, 2020

3. Tahap Pelaporan

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama satu bulan Penulis memiliki kewajiban kepada Politeknik Palcomtech untuk memberikan laporan mengenai kegiatan yang dilaksanakan ditempat kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Penulis mempersiapkan

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai bulan Januari 2021.

Kegiatan yang dilakukan oleh Penulis selama melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah mempelajari lingkungan kerja serta mencatat pengetahuan baru selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Dan yang terakhir adalah mencatat semua hasil kegiatan disertai dengan adanya data-data untuk proses dalam bentuk sebuah laporan Praktik Kerja Lapangan.

1.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis dalam Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu:

1. Observasi

Menurut Marshall (dalam Sugiyono 2016:310) menyatakan bahwa, *“through observation, the researcher learn behavior and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi, Penulis belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam melakukan observasi, Penulis akan terlibat kegiatan sehari-hari proses kerja dan orang yang diamati sebagai sumber data. Penulis melakukan pengamatan langsung mengenai cara kerja dalam merekap data gaji pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, dan Penulis juga ikut terjun langsung untuk mengamati cara kerja dari pegawai tidak tetap.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:231), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam teknik wawancara ini Penulis melakukan tanya jawab kepada pemilik perusahaan secara tatap muka. Melalui wawancara ini, Penulis akan mengetahui lebih dalam mengenai aktivitas proses kerja CV. Bermakarya. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan bapak Jefri Agit Saputra selaku Direktur Utama CV. Bermakarya mengenai permasalahan yang dihadapi pada laporan keuangan dan kinerja pegawai tetap maupun tidak tetap.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) menyatakan “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.” Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan. Dokumentasi yang didapat dari CV. Bermakarya berupa foto-foto yang dibutuhkan Penulis untuk mengerjakan laporan ini, diantaranya foto saat melakukan kegiatan penginputan gaji pekerja, foto saat terjun langsung ke lapangan untuk melihat proses pembangunan rumah dan kegiatan lainya selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

BAB II

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL

2.1. Profil perusahaan dan sejarah

CV. Bermakarya, berlokasi di Palembang, Sumatra Selatan-Indonesia. Berdiri pada tahun 2010 dan mulai bergerak dibidang Kontraktor interior dan eksterior. Selama tujuh tahun perusahaan mengalami jatuh bangun. Pada tahun 2017 perusahaan tersebut secara legal diakui keberadaanya secara resmi. Perusahaan ini mengerjakan renovasi pembangunan baru dengan didukung tenaga-tenaga profesional yang sudah terlatih dibidangnya. Maka dari itu Bermakarya selalu mengedepankan kualitas dan kecepatan serta memberikan harga yang terbaik untuk memberikan kenyamanan utama bagi konsumen.

CV. Bermakarya memiliki arti Berjaya bersama karya, yang dimana makna dari kata tersebut memiliki arti tersendiri yaitu sebuah pencapaian agar karya-karya dari perusahaan tersebut lebih dihargai lagi, pada mulanya CV. Bermakarya basic atau dasarnya bukan terletak pada kontraktor Eksterior. Namun, CV. Bermakarya lebih mengutamakan kepada bagian kontraktor Interior, seperti pemasangan dan perbaikan atap rumah, desain kontraktor interior, pengecatan bangunan, pemasangan wallpaper dinding, pemasangan perbaikan jendela dan pintu. Dari banyaknya komentar positif dari klien/konsumen yang memberikan kepercayaan kepada perusahaan.

Yang akhirnya berlanjut untuk beralih kedalam unit usaha yang mencakup kontraktor eksterior dan interior, untuk bagian company services CV. Bermakarya juga menyediakan Road construction, Heavy equipments, dan Mechanical engineering. Dengan dukungan dan kerja sama tim yang terdiri dari tenaga-tenaga profesional dan terlatih dibidangnya yang selalu mengedepankan kualitas dan pelayanan yang terbaik untuk membuat konsumen terasa puas.

CV.Bermakarya didirikan bersama rekan kerja yang terdiri dari lima orang, dengan bagian masing-masing, namun akibat suatu kendala empat orang lainnya memutuskan hubungan untuk berjalan sendiri-sendiri. Dan hingga sekarang CV.Bermakarya Dipimpin Oleh Jefri Agit Saputra jadi pemilik tunggal perusahaan . Untuk pegawai nya sendiri, CV.Bermakarya memiliki pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tetap yang berada diperusahaan ada empat orang, sedangkan untuk pegawai tidak tetap atau buruh tergantung dengan besarnya project yang akan dikerjakan atau tidak tentu. Seperti beberapa tahun yang lalu CV. Bermakarya memiliki project besar dengan pembuatan perumahan yang menggunakan pegawai tidak tetap mencapai hingga 200 orang lebih.

CV. Bermakarya pertama kali bekerja sama dengan salah satu Hotel Al-Furqon Palembang. Pembangunan hotel dengan menggunakan jasa dari CV. Bermakarya yang mengeluarkan dana hingga ratusan juta rupiah, dan dibantu oleh puluhan pegawai tidak tetap lainnya. Dilanjutkan dengan pembangunan gedung wallet, pengecoran jalan utama desa,

pembangunan ombai café, pembangunan kantor BPN Baturaja, Dan masih banyak lagi kerjasama dengan CV.Bermakarya seperti pembangunan perumahan, gedung, perkantoran, pertokoan, dan pergudangan dan masih banyak lagi

2.2. Visi dan Misi Perusahaan

Ketika mendirikan sebuah perusahaan setiap pendiri menggagas impian, tujuan dan target yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan visi dan misi perusahaan. Sama dengan perusahaan lainnya. CV. BermaKarya juga memiliki visi dan misi. Berikut adalah visi dan misi CV. BermaKarya Palembang:

Visi

“Menjadikan BermaKarya perusahaan eksterior interior terdepan dalam kualitas dari segi produk dan pelayanan Indonesia”

Misi

“Selalu menjadikan kepuasan pelanggan sebagai komitmen dan prioritas utama, selalu menerapkan k3 di setiap pekerjaan, selalu memiliki inovasi terbaik, selalu menjadi tim yang professional”

2.3. Program yang Dikelola CV. Bermakarya

CV. Bermakarya menyelenggarakan 5 (lima) jenis program, yaitu:

1. Interior Project

Interior Project merupakan program yang dilakukan untuk merencanakan, menata dan merancang ruang-ruang bagian dalam bangunan. Bertujuan untuk menyusun secara teratur bagian demi bagian menjadi satu tatanan yang utuh demi maksud-maksud tertentu.

Menyediakan:

- a. Desain interior bangunan
- b. Kontruksi ruangan

2. Exterior Project

Exterior Project merupakan program yang dilakukan untuk menghasilkan merencanakan, menata, dan memperbaiki bagian luar bangunan, bertujuan untuk agar bangunan tersebut tertata rapih dan indah untuk dipandang.

Menyediakan:

- a. Desain Eskterior Bangunan
- b. Konstruksi Fasad Bangunan
- c. Pengecatan Bangunan
- d. Pemasangan dan Perbaikan Jendela dan Pintu
- e. Pemasangan dan Perbaikan Atap Pintu

3. ***Road Construction***

Road Construction merupakan program pembangunan jalan raya yang bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta memiliki peran dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Menyediakan:

- a. Perbaikan Aspal
- b. Pembuatan Jalan
- c. Kualitas Tinggi Komponen Aspal
- d. *Service Maintance*

4. ***Heavy Equipments***

Heavy Equipments merupakan program Alat berat mengacu pada kendaraan tugas berat, yang dirancang khusus untuk melaksanakan tugas konstruksi, yang paling sering melibatkan operasi pekerjaan tanah. Mereka juga dikenal sebagai mesin berat, truk berat, peralatan konstruksi, peralatan teknik, kendaraan berat.

Menyediakan:

- a. *Heavy-Duty Trucks*
- b. Traktor
- c. Trailer
- d. Alat Donstruksi

5. *Mechanical Engineering*

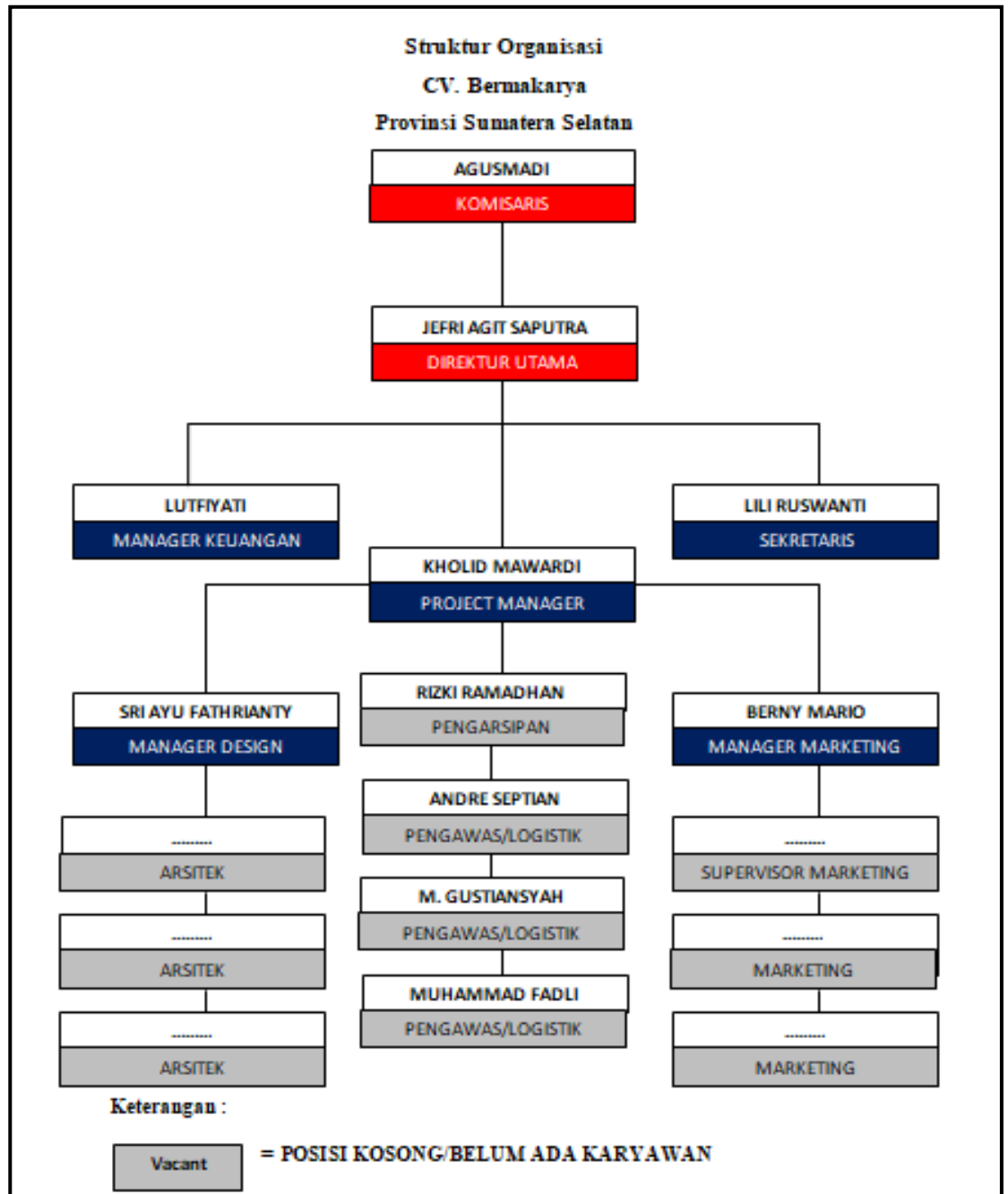
Mechanical Engineering merupakan program teknik mesin atau teknik mekanik mengenai aplikasi dari prinsip fisika yang kemudian diimplementasikan pada analisis, desain, manufaktur dan pemeliharaan mesin. Teknik mesin terdiri dari perancangan mekanik dan konstruksi, sistem produksi, konversi energi dan ilmu metalurgi.

Menyediakan:

- a. Analisis Mekanik
- b. Teknisi Manufaktur
- c. Elektrikal Management Kualitas Tinggi Komponen
- d. *Service Maintance*

2.4. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi CV. Bermakarya.



Sumber: Struktur Organisasi Perusahaan CV. Bermakarya Palembang 2019

Gambar 2.1 Struktur Organisasi CV. BermaKarya Palembang

2.5. Uraian Tugas Wewenang

1. Komisaris

Komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi seluruh aktivitas yang terjadi di dalam CV. Bermakarya. Terutama tugas komisaris yaitu terkait kebijakan dalam pengelolaan perusahaan. Bisa dibayangkan komisaris merupakan jabatan dalam perusahaan yang terdiri dari suatu kelompok atau dewan.

Dalam sebuah perusahaan apapun, komisaris merupakan jabatan yang sangat penting. Mengingat tugas komisaris sebagai pengawas seluruh aktivitas di dalam perusahaan, yang mana hal ini sangat dibutuhkan oleh pelaksana organisasi perusahaan seperti direktur. Fungsi lain dari komisaris dalam sebuah perusahaan yaitu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Selain itu juga bertugas untuk memberikan arahan arahan lebih lanjut. Inilah yang menjadi perbedaan komisaris dan direktur.

2. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas mengatur perusahaan secara menyeluruh dengan menggunakan wewenangnya. Direktur utama memiliki tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena tidak melaksanakan tugas direktur utama dengan baik. Yang dimaksud adalah kepengurusan yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan anggaran dasar perusahaan. Atas kerugian tersebut maka

direktur utama akan dimintai pertanggungjawaban baik perdata atau pidana.

Namun apa bila kerugian murni karena bisnis bukan karena kelalaian direktur maka direktur utama tidak bisa disalahkan. Jadi direktur utama bertanggung jawab penuh atas kerugian dan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan selama masa jabatannya.

3. Manager Keuangan

Manajer keuangan mempunyai tugas jabatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena sebagai ujung tombak yang berkaitan dengan keuangan. Peran manajer keuangan dapat beragam, tergantung pada ukuran dan kompleksitas suatu perusahaan. Sebagai contoh, di perusahaan yang lebih besar, mungkin manajer keuangan dapat melakukan kegiatan yang terfokus seperti analisis strategi.

Kegiatan ini berfungsi untuk membantu para manajer senior membuat keputusan terbaik. Hal tersebut dapat mencakup interpretasi informasi keuangan dan perkiraan berbagai tren di masa mendatang. Di perusahaan yang lebih kecil, manajer keuangan dapat mempunyai tanggung jawab yang jauh lebih luas, atau mungkin mengelola seluruh fungsi keuangan.

Tugas utama dari Manajer Keuangan ialah membantu perencanaan bisnis serta memberikan nasihat keuangan yang sesuai.

Adapun beberapa tugas umum lainnya ialah sebagai berikut.

- a. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- b. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan.
- c. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat.
- d. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem serta prosedur keuangan akuntansi. Selain itu juga mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur.
- e. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

4. Sekretaris

Sebagai salah satu orang yang berperan penting membantu atasannya, seorang sekretaris selain harus bisa menjaga penampilannya, ia juga harus memiliki berbagai kecakapan

komunikasi dan kesekretariatan, karena hal ini akan membawa citra pribadi, atasannya maupun perusahaan dimana ia bekerja.

Melalui berbagai kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat/publik, Sekretaris dalam perusahaan juga dituntut untuk turut menjaga citra perusahaannya dan mewakili Direksi dalam setiap kegiatan komunikasi eksternal, khususnya dengan pihak regulator, investor, komunitas pasar modal dan para pemangku kepentingan lainnya.

Adapun Fungsi Sekretaris dalam Perusahaan terdiri dari berbagai tugas kesekretariatan, hubungan investor dan masyarakat, legal dan penegakan kepatuhan terhadap otoritas industri dan pasar modal serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Tugas Sekretaris

Seorang sekretaris dalam perusahaan mempunyai multi tugas dalam bekerja. Adapun tugas-tugasnya diantaranya adalah :

- a. Memfilter informasi dan sebagai sumber informasi bagi pimpinan dan menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.
- b. Menanggapi pertanyaan dari klien atau mitra bisnis secara langsung, melalui telepon atau email.
- c. Memperlancar kegiatan ketatausahaan seperti mengetik, kearsipan, Komputer, dan penggandaan dokumen yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan.

- d. Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan Direktur. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan misalnya melakukan pertemuan, kunjungan antaran pimpinan dan konsumen dalam rangka menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan pimpinan.
- e. Mengembangkan dan menerapkan prosedur kantor.
- f. Menjaga sistem rekaman perusahaan untuk menjunjung tinggi fie yang akurat.
- g. Memberikan ide-ide sebagai alternatif pemikiran pimpinan.
- h. Pemegang rahasia penting pimpinan yang berkaitan dengan perusahaan.
- i. Menulis surat, memo, dan email.

5. *Project Manager*

Seorang *Project Manager* mempunyai tugas tanggung jawab dan tugas yang bermacam-macam, tidak hanya terfokus pada hal-hal yg teknis sifatnya. Seorang *Project Manager* harus mempunyai kemampuan membuat tim proyek agar tetap solid, mampu memonitor dan mengontrol budget dengan membuat *bar chart* Dan *critical path* serta mempunyai kemampuan analisis resiko yang baik. Berikut adalah tugas dari seorang *Project Manager*:

- a. Menbuat rencana dan proses untuk memantau dan melaporkan kemajuan proyek.

- b. Komunikasikan kemajuan dengan manajemen.
- c. Berkomunikasi secara efektif dengan klien untuk memastikan mereka tetap puas dengan pelayanan yang telah diberikan.
- d. Memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran.
- e. Melakukan proses manajemen resiko untuk mengurangi resiko perusahaan.

6. *Manager Design*

Walaupun seorang *Manager Design* adalah pekerja seni yang pada ‘umumnya’ mempunyai kebebasan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, namun seorang *manajer design* tetap memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi. Dalam hal ini perusahaan berperan penting untuk mengatur SOP seorang desain grafis di perusahaannya. Berikut adalah Tugas Dan Tanggungjawab *Manajer Design* yang antara lain adalah

- a. Mempunyai tugas bertemu klien untuk membahas tujuan bisnis dan kebutuhan pekerjaan.
- b. Mengembangkan prototype desain yang sesuai dengan tujuan klien.
- c. Memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

- d. Menggunakan inovasi untuk mendefinisikan kembali desain dalam keterbatasan biaya dan waktu.
- e. Berfikir kreatif untuk menghasilkan ide-ide dan konsep-konsep baru dan mengembangkan desain interaktif.
- f. Mempersentasikan ide dan konsep yang telah dibuat.

7. Arsitek

Mempunyai tugas menata letak bangunan yang, mengelola tata ruang sebuah bangunan, menentukan jenis dan letak instalasi listrik dalam sebuah bangunan. Mengelola bentuk luar dan tampak sebuah bangunan, dan menentukan jenis alat transportasi dalam bangunan seperti lift dan sebagainya.

8. Pengawas/Logistik

Mempunyai tugas mengurus sistem untuk mengawasi proses arus dari logistik dari mulai penyimpanan, pengantaran yang strategis untuk material, bahan-bahan atau suku cadang , dan juga barang jadi atau produk akhir agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh organisasi yang terkait seperti perusahaan.

9. *Manager Marketing*

Marketing Manager/Manajer Pemasaran adalah profesi di bidang marketing yang mempunyai tanggung jawab kerja untuk

membuat perencanaan, pengarahannya, dan atau memberikan koordinasi kebijakan maupun program yang terkait dengan pemasaran. Contohnya saja melakukan identifikasi pasar yang potensial dari permintaan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.

Manajer pemasaran ini juga memiliki andil dalam menyusun strategi harga agar bisa memberikan keuntungan yang maksimal. Selain itu agar bisa memperluas pangsa pasar. Di lain sisi juga harus bisa memperhatikan bagaimana kepuasan pelanggannya.

Tugas lain dari seorang *Manager Marketing* adalah

- a. Memimpin seluruh jajaran Departemen Marketing sehingga tercipta tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas setinggi mungkin.
- b. Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerja sama yang baik dengan konsumen.
- c. Merumuskan target penjualan.
- d. Merumuskan standard harga jual dengan koordinasi bersama Direktur Operasional serta Departemen terkait.
- e. Menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan.

10. Supervisor Marketing

Tugas utama seorang *Supervisor Marketing* adalah memonitoring suatu jalannya produksi agar berjalan lancar dan

terkendali, Supervisor harus bertanggungjawab dalam memastikan semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik sehingga semua proses produksi berjalan lancar seperti memonitoring produksi, pengawasan, melakukan instruksi kerja, bertanggungjawab keamanan, keselamatan atau kesehatan yang terancam.

Tugas dan tanggungjawab *supervisor marketing* adalah

- a. Menulis dan menyajikan siaran pers untuk meningkatkan promosi, sponsor acara eksternal dan kemitraan strategis.
- b. Mengembangkan dan memelihara hubungan promosi dengan sekolah, organisasi masyarakat dan bisnis setempat.
- c. Mengembangkan dan melaksanakan program periklanan dan pemasaran eksternal.
- d. Menyiapkan strategi pemasaran dan merencana aksi untuk mencapai tujuan pemasaran yang spesifik.
- e. Mengawasi tingkat pemasaran, media, acara dan hubungan masyarakat, promosi dan periklanan lokal.

11. Marketing

Mempunyai tugas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kosumen. Marketing juga bertugas untuk mempromosikan kegiatan promosi agar dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, marketing harus mengetahui jenis promosi apa yang ingin digunakan, dapat menggunakan brosur, *banner*, dan lain sebagainya. Memasarkan

dengan menggunakan brosur atau poster dapat menjadi media pembantu untuk memudahkan tugas marketing.

2.6. Lambang CV. Bermakarya Palembang

Berikut ini adalah lambing CV. Bermakarya.



Gambar 2.2 Lambang Perusahaan CV. Bermakarya Palembang

Keterangan:

1. Bermakarya memiliki arti Berjaya Bersama Karya, yang dimana hasil dari karya-karya perusahaan ingin lebih dapat dihargai.
2. Warna putih pada bermakarya memiliki arti keseimbangan.
3. Warna Biru melambangkan ketentraman,damai,tenang, terpercaya dan professional.
4. Warna merah melambangkan memberi kesan berani, tegas.
5. Warna abu-abu menggambarkan keseriusan, kestabilan.

BAB III

HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN

3.1. Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan dengan Penempatan di bagian Keuangan CV. Bermakarya. Beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) menyusun data bukti perekapan gaji pegawai tidak tetap yang dilakukan dari awal sampai akhir bulan. Disini penulis mencoba mendeskripsikan apa yang telah penulis lakukan selama satu bulan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

Penulis melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada CV. Bermakarya selama kurang lebih satu bulan mulai dari 21 September sampai dengan 21 Oktober 202. Waktu Praktik Kerja harian disesuaikan dengan jam kerja yang ada pada CV. Bermakarya Palembang, yaitu dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, maka bentuk-bentuk pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing lapangan merupakan kebijakan dari prosedur pada CV. Bermakarya. Merupakan bagian yang bertugas menginput data untuk perekapan gaji pegawai tidak tetap hal ini dilakukan rutin setiap seminggu sekali.

Pada saat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan, penulis hanya tertuju pada tugas dan prosedur CV. Bermakarya yang berkaitan dengan rekapan gaji pegawai tidak tetap.

Tabel 3.1

Tabel Kegiatan Harian PKL di CV. Bermakarya

Tanggal	Jam Kerja	Kegiatan
21 Sep - 25 Sep (Minggu pertama)	08.00 – 16.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan kepada seluruh Staf CV. Bermakarya. 2. Pembagian tugas dan aktivitas. 3. Melihat contoh format rekapan. 4. Membantu Merekap gaji pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
28 Sep - 2 Okt (Minggu kedua)	08.00 – 16.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belajar menghitung PPh Pasal 21. 2. Melihat laporan keuangan. 3. Membantu mencatat kas bon pegawai tidak tetap. 4. Membantu merekap gaji pegawai tidak tetap.
5 Okt - 9 Okt (Minggu ketiga)	08.00 – 16.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menginput nota pembelian barang. 2. Membantu membuat surat. 3. Membantu merekap gaji pegawai tidak tetap
12 Okt - 16 Okt (Minggu keempat)	08.00 – 16.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat langsung kerja pegawai tidak tetap. 2. Membantu fotocopy dan menata berkas dilemari. 3. Merekap gaji pegawai tidak tetap
19 Okt - 21 Okt (Minggu kelima)	08.00 – 16.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara narasumber. 2. Perpisahan Pkl/ selesai.

Sumber; diolah 2020

3.1.1. Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Selama kurang lebih satu bulan Penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan kegiatan keseharian. Selama kurang lebih satu bulan Penulis mendapatkan banyak tugas yang diperintahkan langsung oleh Direktur Utama Bapak Jefri Agit Saputra seperti, menyusun data rekapan gaji pegawai tetap dan tidak tetap, dan menginput data pembelian barang, mengenprint data atau berkas perusahaan. Dan Penulis sedikit demi sedikit Penulis mulai mengerti dengan pekerjaan di CV. Bermakarya.

3.1.2. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbala secara langsung serta digunakan guna kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat.

Menurut P. J. A Andriani dalam Waluyo (2017:2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Madismo (2018:5), Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sector swasta kepada sektor publik yang dapat digunakan untuk dipaksakan serta yang langsung ditujukan dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat wajib dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

3.1.3. Fungsi Pajak

Salah satu bentuk bentuk manfaat dengan adanya pajak ialah sebagai sumber pendapatan Negara dalam rangka membiayai semua pengeluaran proses pembangunan Negara secara menyeluruh. Pemerintah melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat secara umum sehingga pajak memiliki beberaa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Salah satu fungsi pajak yakni sebagai pengatur kebijakan Negara dalam bidang sosial ekonomi. Berikut adalah beberapa fungsi Mengatur:

- a. Dengan adanya pajak dapat menghambat kenaikan inflasi

- b. Dengan adanya pajak akan mendorong kegiatan ekspor dan impor.
- c. Dengan adanya pajak akan memberikan perlindungan terhadap barang retribusi dalam negeri.
- d. Dengan adanya pajak akan mudah untuk mengatur dan menarik investasi yang bisa membantu perekonomian Negara semakin produktif.

2. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Bagi keuangan Negara pajak menjadi salah satu sumber terbesarnya, disini pajak diperuntukan membiayai pengeluaran dalam semua pembangunan baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, secara nasional.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi pajak untuk menstabilkan keadaan atau kondisi semua perekonomian Negara, seperti mengatasi inflasi, bisa saja pemerintahan menetapkan tarif pajak yang tinggi akhirnya berdampak terhadap penyusutan peredaran uang.

4. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Fungsi lain dari pajak bisa menyesuaikan atau menyertakan pendapatan dan juga kesejahteraan setiap warga Negara. Di Negara Indonesia ada sebuah lembaga yang bernama DJP, lembaga ini memiliki tugas dalam mengelola perpajakan Negara dibawah kementerian republik Indonesia. DJP ini juga bertugas untuk

memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap masyarakat dengan sebaik mungkin.

3.1.4. Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Siti Resmi (2017) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan berdasarkan golongannya, lembaga pemungutnya, maupun sifatnya, adapun penjelasannya antara lain:

1. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang dimana pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan dinas. Pajak Daerah terdiri atas :
 - 1) Pajak Provinsi
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2. Pajak berdasarkan golongan, dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Pajak berdasarkan sifatnya, dapat dibagi menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Petambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut Mardismo (2018:20), ada tiga macam cara yaitu:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menetapkan pajak yang terutang sendiri, membayar pajaknya sendiri, dan melaporkan jumlah pajaknya yang terutang ke KPP dimana wajib pajak terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

2. *Official Assessment system*

Official Assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak tersebut oleh fiskus. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

3. *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari

wajib pajak. Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang atau badan yang bukan merupakan badan publik yang sebenarnya, yang mempunyai wewenang untuk memungut pajak atas jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, pemegang saham, penerima pekerjaan, sehubungan dengan pekerjaan jasa dan lain sebagainya.

3.1.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang akan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas lainnya, maka jumlah dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan dikenai Pasal 25/29. Apabila memiliki status sebagai pegawai atau penerima penghasilan, maka penghasilan tersebut tidak dapat dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan PTKP terbaru yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009, dan pada tahun 2012 telah muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang menerapkan PTKP terbaru, kemudian disusul di tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, dan terakhir pada tahun 2016 ini pemerintah kembali mengoreksi besarnya PTKP dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Jadi selama 7 Tahun saja PTKP

sudah diubah sebanyak empat kali. Perubahan terbaru yang kembali dilakukan oleh pemerintah dengan dilakukannya Peraturan Menteri Keuangan PMK No.101/PMK.010/2016 Pada tanggal 22 Juni 2016 berlaku sejak 1 Januari 2016 yaitu besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sampai dengan tahun 2017 adalah Rp 54.000.000,-, sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP Pria/Wanita Lajang		PTKP Pria Kawin		PTKP Suami Istri Gabung	
TK/0	Rp 54.000.000,-	K/0	Rp 58.500.000,-	K/1/0	Rp 112.500.000,-
TK/1	Rp 58.500.000,-	K/1	Rp 63.000.000,-	K/1/1	Rp 117.000.000,-
TK/2	Rp 63.000.000,-	K/2	Rp 67.500.000,-	K/1/2	Rp 121.500.000,-
TK/3	Rp 72.000.000,-	K/3	Rp 72.000.000,-	K/1/3	Rp 126.000.000,-

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2020

Keterangan kode-kode PTKP yang tertera pada table diatas, berikut ini penjelasan selengkapnya:

1. Status Lajang (TK)
 - a. TK/0 artinya seorang laki-laki/perempuan yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.
 - b. TK/1 artinya seorang laki-laki/perempuan yang belum menikah dan memiliki satu tanggungan.
 - c. TK/2 artinya seorang laki-laki/perempuan yang belum menikah dan memiliki dua orang tanggungan.

- d. TK/3 artinya seorang laki-laki/perempuan yang belum menikah dan memiliki tiga orang tanggungan .
2. Status Kawin (K)
- a. K/0 artinya telah menikah dan tidak memiliki tanggungan.
 - b. K/1 artinya telah menikah dan memiliki satu tanggungan.
 - c. K/2 artinya telah menikah dan memiliki dua tanggungan.
 - d. K/3 artinya telah menikah dan memiliki tiga tanggungan
3. Status PTKP digabung
- a. K/1/0 artinya penghasilan suami dan istri digabung serta tidak memiliki tanggungan.
 - b. K/1/1 artinya penghasilan suami dan istri digabung dengan memiliki satu tanggungan.
 - c. K/1/2 artinya penghasilan suami dan istri digabung dengan memiliki dua tanggungan.
 - d. K/1/3 artinya penghasilan suami dan istri digabung dengan memiliki tiga tanggungan.

3.1.7. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi tau subyek pajak dalam negeri.

Subyek pajak adalah pihak yang memperoleh penghasilan. Maka dari itu, setiap karyawan, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayar Pajak Penghasilan.

3.1.8. Tarif dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Bab V Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016, Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penerima penghasilan kena pajak, antara lain:
 - a. Pegawai tetap.
 - b. Penerima pensiun berkala.
 - c. Pegawai tidak tetap dengan penghasilan perbulan melewati Rp 4.500.000.
 - d. Bukan pegawai seperti yang dimaksud dengan PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan berkesinambungan
2. Seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp 450.000 per hari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000.

3. 50% dari penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 pasal 3(c) yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerimaan penghasilan selain menerima penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam tiga poin diatas.
5. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 26 adalah jumlah bruto.
6. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang pajak penghasilan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan NPWP

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan tahunan hingga Rp50.000.000	5%
Penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000	15%
Penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000	30%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2020

Berikut penjelasan berdasarkan table diatas:

- a. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000 adalah 5%.
- b. WP dengan penghasilan tahunan diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 adalah 15%.

- c. WP dengan penghasilan tahunan diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 adalah 25%.
- d. WP dengan penghasilan diatas Rp 500.000.000 adalah 30%.
- e. Bagi Penerima Penghasilan (Wajib Pajak) yang tidak mempunyai NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

Berikut ini rincian tarifnya:

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
2. Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat tidak final.
3. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Gaji Pegawai tidak tetap CV. Bermakarya Palembang merupakan suatu hak yang diberikan kepada pegawai tidak tetap dan merupakan balas jasa/penghargaan kerja bagi pekerja. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan harian tidak sama dengan karyawan yang digaji bulanan, misalnya dalam menerapkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, ada sejumlah ketentuan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 upah harian, yaitu:

1. Apabila penghasilan kumulatif Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas Harian dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000, berlaku ketentuan berikut:
 - a. Tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, jika penghasilan sehari atau rata-rata sehari belum melebihi Rp 450.000.
 - b. Dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, jika penghasilan sehari atau rata-rata sehari melebihi Rp 450.000, dan jumlah Rp 450.000 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
2. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

3. Dalam hal Pegawai Tidak Tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi Rp 4.500.000 maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya.
4. PTKP yang sebenarnya adalah PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
5. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP setahun dibagi 360 hari.
6. Iuran jaminan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh Pegawai Tidak Tetap kepada badan penyelenggaran jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berikut ini tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap atau tenaga kerja lepas:

Tabel 3.4

Tariff PPh 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan Harian	Penghasilan Kumulatif Sebulan	Tarif dan DPP
<Rp 450.000	<Rp 4.500.000	Tidak dilakukan pemungutan PPh 21
>Rp450.000	<Rp 4.500.000	5% x (Upah - Rp 450.000)
>Rp 450.000	>Rp 4.500.000	5% x (Upah - PTKP/360)
<Rp 450.000		
>Rp 450.000	>Rp 10.200.000	Tarif Pasal 17 x Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang di setahunkan
<Rp 450.000		

Sumber: Klik pajak by mekari, 2020

Berikut ini daftar gaji pegawai tetap atau tenaga kerja lepas CV.

Bermakarya:

Tabel 3.5

Gaji Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

No	Nama	Status	Jumlah Anak	Hari Kerja	Gaji	
					Harian	Mingguan
1	M. Syahrul	Kawin	2	6	Rp 135.000	Rp 810.000
2	Kemas Fitriansyah	Kawin	1	6	Rp 155.000	Rp 930.000
3	M. Iwan	Kawin	3	6	Rp 190.000	Rp 1.140.000
4	M. Rio Saputra	Tidak Kawin	0	6	Rp 230.000	Rp 1.380.000
5	Gustiansyah	Tidak Kawin	0	6	Rp 280.000	Rp 1.680.000

Sumber: CV. Bermakarya, 2020

Berikut adalah tata cara perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap CV. Bermakarya Palembang :

1. Nama : M. Syahrul
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Status : K/2
- Hari kerja : 6 hari

Perhitungan PPh Pasal 21	Rp 4.500.000 / Rp 135.000	33 Hari
Hari ke 1 – 24		
Upah sehari		Rp 135.000
PPh Pasal 21		NIHIL
Sehingga upah yang diterima		Rp 135.000

2. Nama : Kemas Fitriansyah

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : K/1

Hari kerja : 6 hari

Perhitungan PPh Pasal 21	Rp 4.500.000 / Rp 155.000	29 Hari
Hari ke 1 – 24		
Upah sehari		Rp 155.000
PPh Pasal 21		NIHIL
Sehingga upah yang diterima		Rp 155.000

3. Nama : M. Iwan

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : K/3

Hari kerja : 6 hari

Perhitungan PPh Pasal 21	Rp 4.500.000 / Rp 190.000	23 Hari
Hari ke 1 – 23		
Upah sehari		Rp 190.000
PPh Pasal 21		NIHIL
Sehingga upah yang diterima		Rp 190.000
Kumulatif		
Hari ke 24		
Upah hari ke 24	24 hari x 190.000	Rp 4.560.000

PTKP		
Pribadi	Rp 54.000.000	
Kawin	Rp 4.500.000	
Anak	Rp 13.500.000	
	Rp 72.000.000	
	24 hari x (72.000.000 : 360 hari)	<u>Rp 4.800.000</u>
PHKP		-Rp 240.000
		NIHIL

4. Nama : M. Rio Saputra

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : TK/0

Hari kerja : 6 hari

Perhitungan PPh Pasal 21	Rp 4.500.000 / Rp 230.000	19 Hari
Hari ke 1 – 19		
Upah sehari		Rp 230.000
PPh Pasal 21		NIHIL
Sehingga upah yang diterima		Rp 230.000
Kumulatif		
Hari ke 20		
Upah hari ke 20	20hari x 230.000	Rp 4.600.000
PTKP		
Pribadi	Rp 54.000.000	
Kawin	Rp -	
Anak	Rp -	
	Rp 54.000.000	
	20 hari x (Rp 54.000.000 : 360 hari)	<u>Rp 3.000.000</u>
PHKP		Rp 1.600.000
PPh Pasal 21	5% x Rp 1.600.000	Rp 80.000

PPh 21 dipotong sampai hari ke 19	19 hari x 0	Rp -
PPh Pasal 21 hari ke 20		Rp 80.000
Sehingga upah yang diterima	Rp230.000 – Rp 80.000	Rp 150.000
PPh Pasal 21 yang dipotong per hari pada hari ke 21 – 24		
Upah harian		Rp 230.000
PTKP	Rp 54.000.000 : 360 hari	Rp 150.000
PHKP		Rp 80.000
PPh Pasal 21 hari ke 20 dan seterusnya	5% x 80.000	Rp 4.000
Sehingga upah yang diterima	Rp 230.000 – Rp 4.000	Rp 226.000
	19 hari x NIHIL	Rp -
	1 hari x 80.000	Rp 80.000
	4 hari x 4.000	Rp 16.000
	Total pajak yang harus dibayar	Rp 96.000
Sanksi tidak memiliki NPWP		
	= 120% x Rp 96.000	Rp 115.200

5. Nama : Gustiansyah

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : TK/0

Hari kerja : 6 hari

Perhitungan PPh 21	Rp 4.500.000/Rp 280.000	16 Hari
Hari ke 1 – 16		
Upah sehari		Rp 280.000
PPh Pasal 21		NIHIL
Sehingga upah yang diterima		Rp 280.000

Kumulatif		
Hari ke 17		
Upah hari ke 17	17hari x 280.000	Rp 4.760.000
PTKP		
Pribadi	Rp 54.000.000	
Kawin	Rp -	
Anak	Rp -	
	Rp 54.000.000	
	17hari x (54.000.000 : 360 hari)	<u>Rp 2.550.000</u>
PHKP		Rp 2.210.000
PPh Pasal 21		
PPh Pasal 21	5% x Rp 2.210.000	Rp 110.500
PPh Pasal 21 dipotong sampai hari ke 16	16 hari x 0	Rp -
PPh Pasal 21 hari ke 17		Rp 110.500
Sehingga upah yang diterima		
	Rp 280.000 – Rp 48.000	Rp 232.000
PPh 21 yang dipotong per hari pada hari ke 18 – 24		
Upah harian		Rp 280.000
PTKP	Rp 54.000.000 : 360 hari	Rp 150.000
PHKP		Rp 130.000
PPh Pasal 21 hari ke 18 dan seterusnya		
	5% x Rp 130.000	Rp 6.500
Sehingga upah yang diterima		
	Rp280.000 – Rp 6.500	Rp 273.500
16 hari x NIHIL		
		Rp -
1 hari x 110.500		
7 hari x 6.500		
		Rp 110.500 Rp 45.500
Total pajak yang harus dibayar		
		Rp 156.000
Sanksi tidak memiliki NPWP		
= 120% x Rp 156.000		
		Rp 187.200

Berikut ini rekapitan laporan Pajak Penghasilan 21 untuk tenaga kerja tidak tetap atau tenaga kerja lepas pada CV Bermakarya:

Tabel 3.6
Rekapitan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Bermakarya

No	Nama	Pajak/Bulan	Sanksi	Total Pajak
1	M. Syahrul	Nihil		
2	Kemas Fitriansyah	Nihil		
3	M. Iwan	Nihil		
4	M. Rio Saputra	Rp 96.000	120%	Rp 115.200
5	Gustiansyah	Rp 156.000	120%	Rp 187.200

Sumber: Data diolah, 2020

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai tidak tetap di CV. Bermakarya Palembang berbeda tiap pegawai tidak tetapnya karena berdasarkan pada jabatan dan status dari pegawai tidak tetap tersebut. Pegawai tidak tetap yang memiliki jabatan lebih tinggi seperti mandor pasti memiliki gaji pokok yang lebih tinggi daripada pegawai tidak tetap yang memiliki jabatan seperti tukang yang lebih rendah dan pegawai tidak tetap yang memiliki status kawin dan memiliki tanggungan anak pasti PTKPnya berbeda dengan pegawai tidak tetap yang tidak kawin dan tidak memiliki anak, begitu juga dengan pegawai tidak tetap yang memiliki tanggungan 1 anak pasti PTKPnya berbeda dengan pegawai tidak tetap yang memiliki tanggungan 2 anak atau lebih. Maka dari Pajak Penghasilan 21 berbeda tiap orang.

Bagi pegawai tidak tetap yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap pegawai tidak tetap yang memiliki NPWP. Artinya jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu faktor berbedanya jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan.

3.2 Kendala Yang Dihadapi

Dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan Penulis mengalami kendala yang tentunya menjadi hal yang mengganggu dalam kelancaran aktivitas Praktik Kerja Lapangan Penulis. Hal ini disebabkan karena Penulis terjun langsung ke perusahaan dan jauh berbeda dengan apa yang Penulis dapat di kampus karena hal ini sangat baru bagi Penulis.

Adapun kendala yang Penulis alami selama melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Pada perusahaan CV. Bermakarya Palembang belum sepenuhnya mematuhi peraturan Undang-undang perpajakan, untuk pegawai tidak tetapnya CV. Bermakarya tidak melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Pegawai tidak tetap CV. Bermakarya masih belum sepenuhnya paham akan tata cara pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Mayoritas Pegawai tidak tetap CV. Bermakarya tidak memiliki NPWP.

3.3 Cara Mengatasi Kendala

Dalam mengatasi kendala, Penulis selalu berusaha agar mendapatkan hasil yang terbaik dalam menyelesaikan tugas. Usaha yang dilakukan Penulis antar lain adalah:

1. Perusahaan sebaiknya melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, bukan hanya untuk pegawai tetapnya saja namun diberlakukan juga untuk pegawai tidak tetapnya. Karena dalam melakukan pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang perpajakan di Indonesia.
2. Untuk pemotongan dan pembayaran pajak seharusnya dibantu oleh bagian keuangan CV Bermakarya untuk menghitung dan membayar pajak mereka. Untuk pelaporan pajak akan diberikan pelatihan dan pemahaman kepada pegawai tidak tetap untuk tetap melaporkan pajak mereka sendiri di DJP online sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan pemahaman dan tata cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak kepada pegawai tidak tetap yang belum memiliki NPWP, sehingga pegawai tidak tetap dapat mendaftarkan diri mereka sebagai wajib pajak.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan merupakan sebuah cara dalam menerapkan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan pada kegiatan perkuliahan, selain itu kegiatan Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk mematangkan diri serta lebih dapat mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan Penerapan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV. Bermakarya masih belum sepenuhnya mengikuti perhitungan perpajakan yang seharusnya ada. peraturan tata cara perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap telah diterapkan, namun tidak menerapkannya pada Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap.

4.2. Saran

Berdasarkan pengalaman selama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan, Penulis memiliki beberapa saran yang kiranya dapat membantu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan kedepannya agar lebih baik lagi, yaitu Dalam hal pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tidak tetap pada CV. Bermakarya Palembang, sebaiknya perusahaan dapat melakukan perhitungan pajak dan pembayaran pajak yang seharusnya sudah ditetapkan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, N. (2015). Analisis Pajak Penghasilan Karyawan Pada PT Mangku Jenang Harmoni Sinergy Samarinda.
- Muda, M. (2015). Tinjauan Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada CV Saga Retailindo Sorong.
- Naat, A. Z., Maedina, R., & Hasti, A. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Alfa Global Indonesia Gowa. *Accounting Journal STIE YPUP Makassar Vol. 01, No.4*, 33-41.
- Nurlitasari, Y. D. (2019). Evaluasi Penerapan Sistem Teknologi Digital Perpajakan Dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak (KPP) Pratasma Surabaya SUBeng.
- Pendong, A. A., Elim, I., & Runtu, T. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah v Manado. *Jurnal EMBA Vol.8 No.4*, 923-925.
- Permatasari, A. I., Kumadji, S., & Effendi, I. (2016). Analisis Pehitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No. 1* .
- Setyanto, H. (2017). Tinjauan Atas Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Angkasa pura Kargo.
- Sugiyono. (2016). In *Metode Penelitian Kuantitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, D., & Lisnawati. (2017). Tinjauan Pemungutan, Perhitungan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Cimahi. *TEDC Vol. 11 No.2* .
- Susanti, N. (2018). Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan(PPh) 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pertama Serang. *Tirtayasa EKONOMIKA*.

Petrus, K. (2013). *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta Selatan.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Diktorat Jendral Pajak Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016

Web Site:

<https://bermakarya.wixsite.com/palembang>. diakses pada tanggal 23 oktober 2020. jam 16.00

<https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/apa-itu-pajak-penghasilan-tidak-kena-pajak/> Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2020. Jam 18.45

<https://klikpajak.id/blog/perhitungan/menghitung-ptkp-2019-wajib-pajak-orang-pribadi/> Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2020. Jam 19.30

<https://www.gadjian.com/blog/2020/01/06/cara-hitung-pph-21-upah-harian-karyawan/> Diakses Pada tanggal 12 Desember. Jam 16.25

Lampiran

Link dan Screenshot Vidio PKL

<https://www.youtube.com/watch?v=OKdOHH13-74>

Vidio PKL di CV. Bermakarya Palembang Siti Aprillita Purbaya

9 x ditonton · 24 Jan 2021

1 0 BAGIKAN SIMPAN ...

Siti Aprillita Purbaya
1 subscriber

ANALYTICS EDIT VIDEO

assalamualaikum

